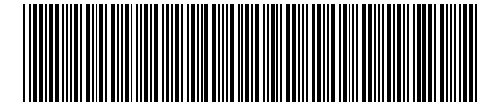




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2019**



DS:3551-9862-2009-0475

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  |
| 3. Provinsi                   | : (01)     | DKI JAKARTA   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (409288) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 36.953.774.000 ( TIGA PULUH ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	36.953.774.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |                |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 36.953.774.000 |
|-------------------|-----------|----------------|

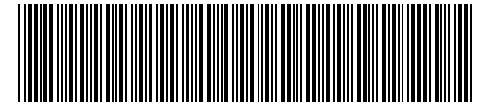
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019**



DS:3551-9862-2009-0475

Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

12	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	36.953.774.000
12.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.950.000.000
12.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	3.500.000.000
12.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	3.555.000.000
12.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.900.000.000
12.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	26.048.774.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.  
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : EDI SUPRAPTO, SH.MH.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			36.953.774.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			36.953.774.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			36.953.774.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Sadar Hu	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Kegiatan	1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional			1.950.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional			
	02	Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional			
Output Kegiatan	1610.001	Anggota JDIH yang terintegrasi	25 Anggota		1.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Sistem Jaringan Informasi	25	Anggota	
Output Kegiatan	1610.002	Dokumen Hukum Nasional	100 Dokumen		450.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	100	Dokumen	
Kegiatan	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			3.500.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.  
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : EDI SUPRAPTO, SH.MH.

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	02	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			
Output Kegiatan	1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum [PN]	12 Rekomendasi		3.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	12	Rekomendasi	
Output Kegiatan	1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1 Dokumen		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1	Dokumen	
Kegiatan	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			3.555.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya kualitas desa sadar hukum, penyuluhan dan penyuluh hukum serta pelaksanaan bantuan hukum untuk orang/kelompok masyarakat miskin			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah			
	02	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan			
	03	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah			
	04	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk			
	05	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk			
	06	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum			
Output Kegiatan	1612.001	Desa Sadar hukum	175 Desa/Kelurahan		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah	175	Desa	
Output Kegiatan	1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	400 Kegiatan		600.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	400	Kegiatan	
Output Kegiatan	1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah		400.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	50 Penyuluh		400.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Instrumen Pendukung Pelaksanaan JFT Penyuluh Hukum	50	Penyuluh/JFT	
Output Kegiatan	1612.005	Media Pemberdayaan Masyarakat	3 Media		255.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk	3	Media	
Output Kegiatan	1612.007	Pengawasan dan Pelatihan Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Bantuan Hukum [PN]	4 Kegiatan		1.400.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Dalam Rangka Melakukan Pengawasan dan Pelatihan Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	4	Kegiatan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.  
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : EDI SUPRAPTO, SH.MH.

Halaman : IA.3

Kegiatan	1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional			1.900.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan penyelarasan naskah akademik			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Tersusunnya Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah			
	02	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan			
	03	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan			
Output Kegiatan	1613.001	Dokumen Program Legislasi	3 Dokumen		700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Prolegda	3	Dokumen	
Output Kegiatan	1613.002	Naskah Akademik RUU	3 Naskah Akademik		700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Disusun	3	Naskah Akademik	
Output Kegiatan	1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	20 Penyelarasan		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	20	Penyelarasan	
Kegiatan	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			26.048.774.000
Sasaran Kegiatan	01	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu			
	02	Terselenggaranya layanan keuangan yang akuntabel dan transparan			
	03	Terselenggaranya layanan data dan informasi BPHN			
	04	Terselenggaranya reformasi birokrasi BPHN dan SPIP			
	05	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu			
	06	Terbangunnya citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN			
	07	Terselenggaranya pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan			
	08	tersediannya dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan			
	09	terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran			
Output Kegiatan	1614.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		1.897.949.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	
Output Kegiatan	1614.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		24.150.825.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.  
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : EDI SUPRAPTO, SH.MH.

Halaman : IA.4

---

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

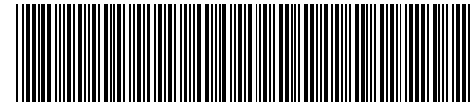
ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019**

**I B. SUMBER DANA**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	36.953.774.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	36.953.774.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>409288</b>	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>	<b>15.392.514</b>	<b>21.311.273</b>	<b>249.987</b>	-	-	<b>36.953.774</b>		
<b>013.10.12</b>	<b>Program Pembinaan Hukum Nasional</b>	<b>15.392.514</b>	<b>21.311.273</b>	<b>249.987</b>	-	-	<b>36.953.774</b>		
<b>1610</b>	<b>Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional</b>	-	<b>1.900.000</b>	<b>50.000</b>	-	-	<b>1.950.000</b>		
1610.001	Anggota JDIH yang terintegrasi	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 00	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
1610.002	Dokumen Hukum Nasional	-	400.000	50.000	-	-	450.000	01 . 00	
01	RM	-	400.000	50.000	-	-	450.000	139	
<b>1611</b>	<b>Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional</b>	-	<b>3.500.000</b>	-	-	-	<b>3.500.000</b>		
1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum [PN]	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	139	
1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
<b>1612</b>	<b>Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</b>	-	<b>3.355.013</b>	<b>199.987</b>	-	-	<b>3.555.000</b>		
1612.001	Desa Sadar hukum	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 00	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	139	
1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 00	
01 RM		-	600.000	-	-	-	600.000	139	
1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	-	200.013	199.987	-	-	400.000	01 . 51	
01 RM		-	200.013	199.987	-	-	400.000	139	
1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 51	
01 RM		-	400.000	-	-	-	400.000	139	
1612.005	Media Pemberdayaan Masyarakat	-	255.000	-	-	-	255.000	01 . 51	
01 RM		-	255.000	-	-	-	255.000	139	
1612.007	Pengawasan dan Pelatihan Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Bantuan Hukum [PN]	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	01 . 51	
01 RM		-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	139	
<b>1613</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional</b>	-	<b>1.900.000</b>	-	-	-	<b>1.900.000</b>		
1613.001	Dokumen Program Legislasi	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 51	
01 RM		-	700.000	-	-	-	700.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613.002	Naskah Akademik RUU	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 00	
01	RM	-	700.000	-	-	-	700.000	139	
1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 00	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
<b>1614</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN</b>	<b>15.392.514</b>	<b>10.656.260</b>	-	-	-	<b>26.048.774</b>		
1614.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	1.897.949	-	-	-	1.897.949	01 . 51	
01	RM	-	1.897.949	-	-	-	1.897.949	139	
1614.994	Layanan Perkantoran	15.392.514	8.758.311	-	-	-	24.150.825	01 . 00	
01	RM	15.392.514	8.758.311	-	-	-	24.150.825	139	
<b>JUMLAH</b>		<b>15.392.514</b>	<b>21.311.273</b>	<b>249.987</b>	-	-	<b>36.953.774</b>		

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409288	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.096.012	1.355.276	1.767.473	2.443.222	2.452.523	3.245.547	3.843.799	3.672.339	4.340.758	3.462.655	4.240.547	5.033.623	36.953.774
		<b>51 BELANJA PEGAWAI</b>	898.923	912.776	994.356	1.265.265	1.214.469	1.868.651	1.454.593	1.343.766	1.814.777	891.227	1.357.620	1.376.091	15.392.514
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	196.064	434.750	762.943	1.167.858	1.227.530	1.363.922	2.367.682	2.303.749	2.497.682	2.548.829	2.853.579	3.586.685	21.311.273
		<b>53 BELANJA MODAL</b>	1.025	7.750	10.174	10.099	10.524	12.974	21.524	24.824	28.299	22.599	29.348	70.847	249.987
	013.10.12.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	17.685	40.310	70.055	106.140	111.545	124.195	215.395	210.355	228.340	231.760	260.280	333.940	1.950.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	17.480	38.760	68.020	104.120	109.440	121.600	211.090	205.390	222.680	227.240	254.410	319.770	1.900.000
		53 BELANJA MODAL	205	1.550	2.035	2.020	2.105	2.595	4.305	4.965	5.660	4.520	5.870	14.170	50.000
	013.10.12.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	32.200	71.400	125.300	191.800	201.600	224.000	388.850	378.350	410.200	418.600	468.650	589.050	3.500.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	32.200	71.400	125.300	191.800	201.600	224.000	388.850	378.350	410.200	418.600	468.650	589.050	3.500.000
	013.10.12.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	31.686	74.642	128.248	191.934	201.668	225.100	389.961	382.536	415.847	419.339	472.714	621.325	3.555.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	30.866	68.442	120.109	183.855	193.249	214.721	372.742	362.677	393.208	401.260	449.236	564.648	3.355.013
		53 BELANJA MODAL	820	6.200	8.139	8.079	8.419	10.379	17.219	19.859	22.639	18.079	23.478	56.677	199.987
	013.10.12.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	17.480	38.760	68.020	104.120	109.440	121.600	211.090	205.390	222.680	227.240	254.410	319.770	1.900.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	17.480	38.760	68.020	104.120	109.440	121.600	211.090	205.390	222.680	227.240	254.410	319.770	1.900.000
	013.10.12.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	996.961	1.130.164	1.375.850	1.849.228	1.828.270	2.550.652	2.638.503	2.495.708	3.063.691	2.165.716	2.784.493	3.169.538	26.048.774
		51 BELANJA PEGAWAI	898.923	912.776	994.356	1.265.265	1.214.469	1.868.651	1.454.593	1.343.766	1.814.777	891.227	1.357.620	1.376.091	15.392.514
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	98.038	217.388	381.494	583.963	613.801	682.001	1.183.910	1.151.942	1.248.914	1.274.489	1.426.873	1.793.447	10.656.260
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	787	9.400

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

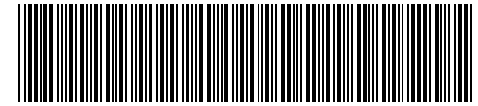
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNB (423141)	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	787	9.400

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IV A. B L O K I R**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

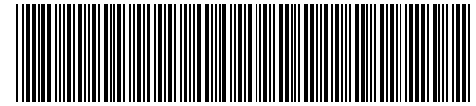
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2019  
IV B. C A T A T A N**



DS:3551-9862-2009-0475

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003